

KOMUNITAS

Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam

Vol. 10, No. 1, Juni 2019

**UPAYA PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS
(GEPENG) SEBAGAI PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI YOGYAKARTA****Zainal Fadri**

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Email: zainalfadri@iainbatusangkar.ac.id***Abstract:***

Vagrant and beggar are one of the social welfare problems currently spreading in urban areas and also began to spread in rural areas. Vagrant and beggar or commonly known as gepeng get daily-life needs by living and earning on the road, even spending a lot of time on the streets. Gepeng is often found in people's lives as beggars and often rises a troublesome because of their actions taken such as picking, grabbing, and robbing, so that proper handling must be carried out immediately. Preventions are carried out in order to create the security and convenience which is a way to provide livelihoods more feasible for them, especially in Yogyakarta. The method used in this paper is qualitative descriptive. Data is taken from using references and previous studies by conducting informal interviews as a approach form gepeng on their activities. The result of this research shows that gepeng has different characteristics from the common street cases, then the handling of gepeng should be taking a different approach. Handling gepeng by the government, the private sector and the community in an integration will certainly have a positive impact on gepeng mitigation, and it has been carried out in Yogyakarta even though it has not overcome the problem completely.

Keywords: Gepeng, Effort, Prevention**A. Pendahuluan**

Masalah kemiskinan merupakan problema yang selalu dihadapi oleh negara-negara berkembang. Banyak negara-negara yang terkesan tidak dapat menanggulangi kemiskinan yang terjadi negara tersebut,

sehingga tidak jarang pula penyelesaian kemiskinan di suatu negara melibatkan campur tangan dari negara lain bahkan oleh perserikatan yang dibangun antar negara. Seperti di Indonesia, semenjak kemerdekaan seolah-olah Indonesia tidak dapat keluar dari persoalan kemiskinan. Indonesia hanya bagaikan lahan untuk bermain-main mengadu kecerdasan strategi bagi negara-negara maju yang dicurigai sebagai pertahanan kemiskinan hingga saat ini.

Kemiskinan dapat digolongkan dalam dua model sesuai dengan faktor penyebab dari kemiskinan. Pertama kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh perencanaan atau dampak dari suatu kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah sehingga masyarakat miskin tidak berdaya untuk mengubah kehidupan mereka. Mereka hidup dalam kemiskinan secara berkelanjutan. Sementara kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang hadir karena faktor internal dari masyarakat miskin yang menjadikan suatu kebiasaan untuk tidak senantiasa melakukan aktualisasi diri, sehingga banyak program dan model pemberdayaan yang dilayangkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kehidupan masyarakat tersebut.

Siahaan mengemukakan bahwa kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang mengacu kepada sikap seseorang atau masyarakat yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki diri dan kehidupan karena adanya budaya atau kebiasaan yang telah berlangsung secara kontinu¹. Mereka merasa cukup dan tidak perlu melakukan perubahan dalam tatanan kehidupan meskipun banyak usaha dari pihak luar yang ikut membantu.

¹ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.

Kemiskinan kultural dikategorikan sebagai kemiskinan yang memerlukan upaya komprehensif dalam pemberantasannya, karena kemiskinan ini sangat berhubungan erat dengan model kehidupan yang telah menjadi rutinitas bahkan dipercayai sebagai aturan dari nenek moyang. Namun berbeda halnya dengan kemiskinan kultural yang dihadirkan oleh sikap malas dan pasrah untuk menerima nasib, seperti yang banyak terjadi pada kaum gelandangan dan pengemis. Istilah gelandangan dan pengemis sering dijumpai dengan singkatan gepeng.

Kemiskinan yang terus melanda gepeng merupakan suatu tradisi yang kurang baik untuk diteruskan pada anak-anak mereka nantinya. Namun, dengan alasan keterbatasan ekonomi keluarga, pengemis dan gelandangan rela melakukan upaya apapun demi mendapatkan bonafit, meskipun dengan cara yang tidak tepat dan menghadirkan keresahan bagi warga sekitar. Selain dengan cara meminta-minta, banyak gepeng menjalani rutinitas dengan jalan melakukan penipuan, perampokan dan lain sebagainya. Hal-hal yang memungkinkan dapat meresahkan masyarakat dengan aktivitas yang dilakukan oleh gepeng menjadikan penanganan gepeng merupakan program yang semestinya segera dilaksanakan dengan cepat.

Kemunculan gepeng di tengah-tengah masyarakat tentunya didukung oleh beberapa faktor. Faktor-faktor kemunculan gepeng merupakan suatu bekal untuk kajian yang kuat atas penanggulangan gepeng, sehingga dapat dihadirkan model penanganan yang tepat dalam bentuk suatu model pencerahan untuk menanggulangi bertambahnya gepeng dalam jangka panjang.

Dari uraian inilah penulis merasa bahwa permasalahan gepeng merupakan masalah yang harus mendapat penanganan, maka dari itu penulis akan memberikan sedikit gambaran mengenai gepeng dalam pembahasan makalah dengan judul Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (gepeng) di Yogyakarta. Pada artikel ini akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan gepeng (gelandangan dan pengemis), diantaranya faktor kemunculan gepeng, dampak gepeng bagi masyarakat, strategi penghapusan gepeng, serta faktor pendukung dan penghambat dalam penanggulangan gepeng.

B. Pengertian gelandangan dan pengemis

Gelandangan merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sementara pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belaskasihan dari orang lain². Gelandangan merupakan orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak pada masyarakat setempat serta tidak mempunyai pencaharian, tempat tinggal yang tetap, serta hidup mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belaskasihan orang lain³.

² Departemen Sosial R.I, 1992

³ PP No. 31 Tahun 1980

Istilah gelandangan berasal dari kata gelandang, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah memiliki tempat kediaman tetap⁴. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa, mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutama di sektor informal, seperti pemulung, pengamen dan pengemis.

Menurut Muthalib dan Sudjarwo dalam Ali, dkk., (1990) gelandangan memiliki tiga gambaran umum, yaitu *pertama*, sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya, *kedua*, orang yang disingkirkan dari kehidupan khalayak ramai, dan *ketiga*, orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan. Ali menyatakan bahwa gelandangan berasal dari gelandang yang berarti selalu mengembara, atau berkelana. Wirosardjono juga menyatakan bahwa gelandangan merupakan lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyarakat kota. Dengan adanya penggolongan tersebut, maka gelandangan merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran di dalam kota, makan-minum serta tidur di sembarang tempat⁵.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai gelandangan dan pengemis dapat diambil kesimpulan bahwa, gelandangan dan pengemis

⁴Marpuji Ali, dkk., *Gelandangan dan Kertasutra dalam Monografi 3*, Surakarta:Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1990.

⁵ Ibid.

merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki kekuatan dalam menjalani kehidupan seperti modal, tempat tinggal dan lain sebagainya, sehingga memaksa mereka untuk menjalani kehidupan ala kadarnya. Kehidupan gelandangan dan pengemis sering berpindah-pindah sesuai dengan potensi sumber yang mereka harapkan menjadi pokok pencaharian, seperti pasar, terminal maupun stasiun. Gelandangan dan pengemis mendapatkan penghidupan atau mata pencaharian dari orang lain, dengan cara meminta-meminta, menipu, maupun melakukan perampokan.

C. Ciri-ciri gelandangan dan pengemis

Terdapat beberapa ciri-ciri yang menjadi karakter bagi gelandangan dan pengemis, diantaranya yaitu⁶:

1. Tidak memiliki tempat tinggal. Kebanyakan dari gelandangan dan pengemis tidak memiliki tempat hunian atau tempat tinggal. Mereka biasa mengembara di tempat umum. Tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni, seperti di bawah kolong jembatan, rel kereta api, gubuk liar di sepanjang sungai, emper toko dan lain-lain
2. Hidup dengan penuh ketidakpastian. Para gepeng hidup menggelandang dan mengemis di setiap harinya. Kondisi ini sangat memperhatikan karena jika mereka sakit mereka tidak bisa mendapat jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh masyarakat, akses untuk berobat dan lain lain.
3. Hidup di bawah garis kemiskinan. Para gepeng tidak memiliki penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka ke depan bahkan untuk sehari-hari mereka harus mengemis atau

⁶ Ibid.

memulung bahkan melakukan tindakan tercela seperti mencuri, merampok, dan lain sebagainya.

4. Tidak memiliki pekerjaan tetap yang layak, seperti pencari puntung rokok, penarik grobak.
5. Memakai baju yang compang camping, Gepeng biasanya tidak pernah menggunakan baju yang rapi atau berdasi melainkan baju yang kumal dan dekil.
6. Meminta-minta dengan cara berpura-pura atau sedikit memaksa, disertai dengan tutur kata yang manis dan iba.
7. Tuna etika, dalam arti saling tukar-menukar istri atau suami, kumpul kebo atau komersialisasi istri dan lain-lainnya.
8. Meminta-minta di tempat umum. Seperti terminal bus, stasiun kereta api, di rumah-rumah atau ditoko-toko.

D. Faktor Munculnya Gelandangan dan Pengemis

Banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya gelandangan dan pengemis di kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengamatan penulis, faktor-faktor munculnya gepeng dapat disebabkan karena:

1. Masalah kemiskinan

Kemiskinan memberi kontribusi yang cukup besar dalam munculnya gelandangan dan pengemis. Seseorang atau kelompok tertentu hidup menggelandang dengan alasan menutupi kebutuhan keluarga, sehingga berbagai macam cara dapat dilakukan tanpa melihat efek dari perbuatannya tersebut. Kemiskinan membuat seseorang lupa diri akan aturan yang melekat pada masyarakat, gelandangan tidak peduli dengan norma maupun ketetapan yang telah disepakati.

2. Masalah pendidikan

Pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang berbuat hanya mengandalkan ego pribadi tanpa memedulikan dampak yang akan diterima oleh orang lain. Gepeng turun ke jalan dan meminta-minta dikarenakan tidak adanya kemampuan dalam menganalisa apakah kegiatan tersebut telah sesuai dengan aturan-aturan selama ini yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu gelandangan dan pengemis biasanya berasal dari anak-anak yang putus sekolah, atau bahkan tidak pernah mencicipi pendidikan sama sekali.

3. Masalah keterampilan kerja

Perpindahan dan urbanisasi merupakan langkah awal bagi kemunculan gembel dan pengemis. Perpindahan dari desa ke kota menuntut para pencari kerja memiliki keterampilan yang memadai sehingga dapat diserap di lapangan kerja. Persaingan yang ketat ditambah dengan kurangnya pengalaman serta keterampilan para urban menjadikan mereka tidak terserap di lapangan kerja, sehingga akhirnya memutuskan untuk menggelandang dengan jalan meminta-minta.

4. Masalah sosial budaya

Budaya dan kebiasaan malas yang telah menjadi modal dalam menjalani hidup sehari-hari menyebabkan suatu bentuk pergeseran nilai sosial terutama dalam bidang etos kerja. Gelandangan dan pengemis yang berasal dari urban yang tidak terserap di lapangan kerja lebih memilih menjadi pengemis dengan jaminan uang tunai perhari tanpa mereka memiliki suatu keahlian khusus. Kemalasan dan tidak mau berusaha

menjadikan gelandangan dan pengemis nyaman hidup dalam rutinitas yang berkelanjutan.

5. Masalah harga diri

Gelandangan dan pengemis kebanyakan mengesampingkan harga diri dalam menjalankan aksinya untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tidak segan-segan untuk menadahkan tangan kepada orang lain meskipun memiliki badan yang kuat dan tidak memiliki kekurangan jika dilihat secara kasat mata. Gelandangan dan pengemis tidak mepedulikan norma kesopanan dan kepatutan dalam menjalankan aksi, bahkan tidak jarang mereka melakukan tipu muslihat demi keuntungan yang lebih besar.

6. Masalah sikap pasrah pada nasib

Sikap pasrah dan *nerimo* pada nasib yang kurang tepat, menjadikan gelandangan dan pengemis seolah-olah menjustifikasi sikap mereka agar tetap bermalas-malasan tanpa ada usaha untuk memperbaiki diri dalam menjalani kehidupan. Sikap malas menjadikan gelandangan dan pengemis meneruskan kegiatan meminta-meminta dibandingkan dengan melakukan inovasi, namun tetap mendapatkan *cash money* yang cukup banyak.

7. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang

Kebebasan yang dijadikan idealisme (meskipun hanya mitos yang tidak harus dilestarikan) membuat sejumlah gelandangan dan pengemis enggan mengubah pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Keengganan untuk berubah mengakibatkan banyaknya program pemberdayaan, baik dari pemerintah maupun swasta tidak berjalan dengan baik. Gelandangan dan pengemis lebih memilih hidup bebas dengan alasan pendapatan akan

lebih banyak didapatkan dibandingkan harus ikut pemberdayaan dan berbagai program maupun penyuluhan yang dilakukan.

Beberapa faktor penyebab munculnya gelandangan dan pengemis memperlihatkan kuatnya tradisi dan kebiasaan yang kurang tepat dijadikan sebagai pedoman hidup karena dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan masyarakat. Sikap dan kebiasaan inilah yang dinamakan sebagai kultur dalam melakukan sumbangsih atas meningkatnya kemiskinan yang ada di masyarakat. Kemiskinan kultural yang dijustifikasi sebagai suatu kebenaran akan menyulitkan berbagai pihak dalam melakukan penanggulangan kemiskinan, terutama penanggulangan masalah gepeng.

E. Model Penanggulangan Gembel dan Pengemis

Penanggulangan gelandangan dan pengemis menjadi tanggungjawab berbagai pihak dan berbagai kalangan. Maraknya gelandangan dan pengemis memperlihatkan penanggulangan gelandangan dan pengemis belum dilaksanakan dengan maksimal. Pemerintah maupun swasta merupakan kelompok yang berkewajiban dalam menyelesaikan permasalahan penanggulangan gepeng, sehingga penanganan dari berbagai kalangan dapat disatukan dalam visi besar, yakni pemberantasan gelandangan dan pengemis demi terciptanya kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan pendekatan panti, liponsos, *transit home*, pemukiman, dan transmigrasi.

1. Pendekatan panti

Pada penanganan dengan model panti, gelandangan dan pengemis akan disediakan tempat tinggal dengan sarana dan prasarana lengkap, yang dihuni oleh beberapa keluarga. Pendekatan panti bertujuan untuk terciptanya komunikasi yang baik antara satu pihak dengan pihak yang lain terutama masalah motivasi untuk segera bangkit dari kehidupan menggelandang sehingga diharapkan ada kemauan dari gepeng untuk berubah bersama-sama. Kebersamaan dalam panti dan diimbangi dengan keterampilan yang diberikan menjadikan gepeng menguasai keahlian tertentu yang nantinya akan bermanfaat dan dapat dikembangkan sebagai modal keterampilan dalam membuka usaha dan peluang kerja.

2. Liponsos

Liponsos adalah singkatan dari Lingkungan Pondok Sosial. Liponsos merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis yang lebih mengedepankan sistem hidup bersama di dalam lingkungan sosial sebagaimana layaknya kehidupan masyarakat pada umumnya. Kehidupan yang dibangun dalam sistem liponsos mirip dengan model pendekatan panti, hanya saja cakupan liponsos lebih luas. Lingkungan liponsos sudah seperti layaknya lingkungan pergaulan di masyarakat, sehingga diharapkan gelandangan dan pengemis mencoba hidup sesuai dengan aturan-aturan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu.

3. *Transit home*

Transit home merupakan tempat penanganan gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapatkan pemukiman tetap pada tempat yang disediakan. *Transit home* hanya merupakan peralihan kehidupan dari jalanan atau menggelandang menuju kehidupan

dengan tempat tinggal tetap, baik berupa liponsos maupun lingkungan masyarakat secara umum. Pada metode *transit home*, gelandangan dan pengemis memulai mengenali diri sendiri dengan pembekalan sederhana sebagai bentuk kesiapan untuk segera berbaur dengan keidupan di masyarakat.

4. Pemukiman masyarakat

Pemukiman merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan tempat tinggal permanen di lokasi tertentu. Penempatan gepeng dalam sebuah tata hubungan masyarakat dilakukan ketika mereka benar-benar siap untuk hidup berdampingan dengan masyarakat, tentunya dengan bekal dan keterampilan yang telah didapatkan semasa pemberdayaan sebelumnya, baik dalam bentuk penyuluhan di rumah panti, ataupun bentuk peningkatan kualitas kepercayaan diri pada liponsos.

5. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan cara terakhir untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis, khususnya di Yogyakarta dan umumnya di pulau Jawa. Gelandangan dan pengemis dalam penanggulangannya dapat diberlakukan sistem transmigrasi, yaitu dengan cara mengirimkan para gepeng ke luar daerah bahkan ke luar pulau, sehingga kepadatan penduduk dan persaingan tenaga kerja yang tinggi tidak lagi merupakan momok bagi semua orang. Gepeng yang telah dipindahkan ke daerah-daerah pedesaan atau bahkan dipulangkan ke desa asalnya diberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai kontribusi dan motivasi usaha yang dapat dilakukan di desa, sehingga pemikiran untuk tinggal dan

bermukim di kota sebagai gelandangan tidak lagi menjadi jalan satu-satunya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Penanggulangan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan salah satu metode di atas, atau bahkan dengan menggabungkan beberapa metode. Penggabungan beberapa metode memperlihatkan beberapa tahap untuk menanggulangi gepeng sehingga diharapkan menjadi suatu model komprehensif dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis, sehingga tidak meresahkan masyarakat dalam menjalani kehidupan.

F. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penanggulangan Gepeng

1. Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Yogyakarta dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu pihak pemerintah berupa kebijakan-kebijakan daerah, pihak organisasi non pemerintah (LSM) berupa advokasi dan pengangkatan wacana, serta dari pihak masyarakat berupa dukungan penuh sekaligus sebagai pelaku utama dalam menanggulangi gepeng.

a. Pihak pemerintah

Pihak pemerintah di D.I.Yogyakarta telah melakukan upaya penanggulangan gepeng sejak dua tahun terakhir. Pemerintah Yogyakarta bertindak sebagai Pemerintah Daerah dalam penanggulangan gepeng telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Pada Perda tersebut ayat 22, mengatakan bahwa “setiap

orang/Lembaga/Badan Hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.”

Dari pernyataan dalam pasal 22 terlihat spirit pemerintah dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis, maka pada tahun 2014 juga dicangangkan oleh pemerintah daerah dengan spirit “2015 Yogyakarta bebas gelandangan dan pengemis.” Selain peraturan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lain sepertinya juga fokus dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis, seperti yang pernah diatur pada:

- 1) Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
- 2) Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- 3) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis.

b. Pihak organisasi non pemerintah (LSM)

Penanggulangan gelandangan dan pengemis tidak luput dari pantauan lembaga sosial kemasyarakatan maupun lembaga masyarakat yang lain. Peran LSM dalam penanggulangan gepeng memiliki fungsi sebagai wahana advokasi sehingga persoalan kemiskinan terutama gelandangan dan pengemis menjadi sorotan dari berbagai pihak. Di Yogyakarta terdapat banyak LSM yang memiliki fokus

terhadap penanggulangan gelandangan dan pengemis yang merupakan faktor pendukung utama dalam aksi menyuarakan kebutuhan masyarakat. Peran LSM yang berpihak pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat diharapkan menjadi landasan utama bagi penanggulangan gepeng dengan pembekalan keterampilan serta sosialisasi agar gepeng siap untuk kembali pada kehidupan bermasyarakat sebagaimana mestinya.

c. Pihak masyarakat

Masyarakat merupakan aktor utama dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis, karena mereka juga berasal dari kehidupan di masyarakat. Masyarakat memiliki posisi sentral sebagai pengawal program dan kebijakan yang diturunkan serta sebagai penilai atas keputusan yang diambil dalam penanggulangan gepeng. Kesediaan masyarakat dalam mendukung program dan membantu melancarkan berjalannya program merupakan suatu langkah pasti dalam penanggulangan gepeng. Lain dari itu, kesediaan dengan terbuka untuk menerima gepeng kembali pada kehidupan sebagaimana mestinya menjadi langkah besar dalam mengembalikan motivasi diri bagi gelandangan dan pengemis untuk kembali menjalani hidup secara wajar dan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

2. Faktor penghambat

Faktor penghambat penanggulangan gelandangan dan pengemis lebih banyak disoroti dari kebiasaan yang dilakukan oleh mereka. Kebiasaan ini merupakan tradisi atau budaya kemiskinan yang menjadikan gepeng sulit untuk berubah sehingga kemiskinan tetap melekat pada diri

gelandangan dan pengemis. Faktor-faktor yang dapat menghambat penanggulangan gelandangan dan pengemis diantaranya budaya malas, budaya *cash money*, gaya hidup boros dan ketidakpedulian terhadap lingkungan sosial.

a. Budaya malas

Budaya malas yang tertanam pada diri gelandangan dan pengemis merupakan penghamabat utama dalam penanggulangan gepeng. Para gepeng hanya mengandalkan modal dan usaha yang minimal dengan menginginkan hasil maksimal tanpa memedulikan kualitas hidup yang dijalani. Budaya malas juga berdampak pada rasa tidak ingin memperbaiki diri dan melakukan inovasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. Budaya malas menjadikan gelandangan dan pengemis seolah-olah nyaman dengan lingkungannya yang dikhawatirkan dapat mengganggu ketenteraman hidup bermasyarakat.

b. Budaya *cash money*

Selain budaya malas, budaya *cash money* yang ada pada diri gelandangan dan pengemis menyebabkan mereka tidak pernah ambil pusing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kehidupan sehari-hari hanya dijalani dengan meminta-minta tanpa menghiraukan harga diri dan norma yang ada, sehingga harapan dari para gepeng adalah mengumpulkan sejumlah uang secara instan, sehingga panghasilan tersebut dapat digunakan saat itu juga.

c. Gaya hidup boros

Gelandangan dan pengemis rata-rata hidup dengan gaya konsumtif yang tinggi. Gaya hidup boros terlihat ketika mereka mendapatkan penghasilan yang mungkin lebih dari cukup, namun tidak tersisa untuk keperluan esok hari sebagai investasi. Kurangnya kesadaran menabung menjadikan gepeng hidup dalam keborosan. Uang yang didapatkan dalam satu hari biasanya akan dihabiskan pada hari itu juga dengan dalih berbagi pada sesama gepeng dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih disayangkan banyak diantara gepeng yang menggunakan uang yang didapatkan dari hasil meminta-meminta hanya untuk memenuhi kebutuhan yang bukan merupakan suatu hal yang urgent untuk dipenuhi, seperti hiburan, mabok-mabokan, untuk menyewa pelacur dan lain sebagainya.

d. Tidak peduli dengan lingkungan sosial

Ketidakpedulian gelandangan dan pengemis terhadap lingkungan kehidupan sosial merupakan salah satu faktor penghambat penanggulangan gepeng yang paling sulit untuk diselesaikan. Jika gelandangan dan pengemis sudah tidak peduli dengan lingkungan sekitar, maka dapat dikatakan apapun upaya yang akan dilakukan oleh berbagai pihak tidak akan dapat berjalan dengan optimal. Kesadaran merupakan kunci dari pemberdayaan, sehingga dengan kesadaran ada keinginan dari dalam diri untuk berubah dan melakukan inovasi perubahan. Jika ketidakpedulian terhadap lingkungan sosial telah tertanam dalam diri gepeng, satu-satunya cara untuk menanggulangi permasalahan ini adalah dengan melakukan tindakan-tindakan tegas yang mungkin akan merugikan pihak gepeng itu sendiri. Tindakan tegas

dilakukan dalam upaya menjaga stabilitas dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

G. Kesimpulan

Penanganan kasus gembel dan pengemis merupakan suatu tantangan bagi pengambil kebijakan karena permasalahan yang dihadapi begitu kompleks. Sebagian gepeng yang ada di Yogyakarta masih memiliki tempat tinggal dan memiliki sanak famili. Alasan keterbatasan ekonomi (bahkan terdapat indikasi berkembangnya budaya malas) sering dijadikan alasan untuk mencari nafkah dan hidup di jalan. Penanganan gepeng dengan berbagai metode yang telah disampaikan akan sulit terealisasi dikarenakan banyak gepeng yang jika ditelusuri merupakan “kaum berada” di kampung halamannya. Penanganan yang akurat dan pendekatan yang tepat diharapkan dapat menjadi model penanggulangan gepeng yang ada di Yogyakarta. Penanganan gepeng akan berjalan dengan baik tentunya tidak terlepas dari dukungan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam bentuk kepedulian terhadap gembel dan pengemis sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Sosial Republik Indonesia Tahun 1992.

Marpuji Ali, dkk. (1990). *Gelandangan dan Kertasutra dalam Monografi 3*, Surakarta: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980.

E-ISSN: 2540-9182

P-ISSN: 2086-3357

N.H.T Siahaan. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Penerbit Erlangga.